



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 191 /180/2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN NOMOR
10/180/2025 TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN RANCANGAN
PERATURAN WALI KOTA PARIAMAN TAHUN 2025

WALI KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka penambahan Rancangan Peraturan Walikota Pariaman ke dalam daftar Program Penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota Pariaman Tahun 2025, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Pariaman Nomor 10/180/2025 Program Penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota Pariaman Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 191 /180/2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI
KOTA PARIAMAN NOMOR 10/180/2025
TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN
RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA
PARIAMAN TAHUN 2025

DAFTAR PENYUSUNAN RANPERWAKO TAHUN 2025

No.	Nama Ranperwako	Pemrakarsa	Latar Belakang Penyusunan dan Dasar Hukum	Materi Pokok, Ruang Lingkup, dan Objek Pengaturan	Sasaran dan Target Waktu Penyelesaian
36.	Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 38 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perhitungan, Pengalokasian dan Prioritas Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Daerah	BPKPD	Latar Belakang: Untuk mengatur lebih terperinci penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada desa dalam upaya peningkatan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah Dasar Hukum: Perwako Nomor 68 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2019 tentang Tata	Pengalokasian dan prioritas penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Tersusunnya Peraturan Perubahan tentang Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Target selesai: Desember 2025
37.	Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	BPKPD	Adanya perubahan ketentuan besaran penghasilan dan kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah Dasar Hukum: Permen PKP Nomor 5 Tahun 2025 tentang Besaran Penghasilan dan Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah serta Persyaratan Kemudahan Pembangunan	Penentuan kriteria masyarakat berpenghasilan rendah dan Pembebasan BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah	Masyarakat Kota Pariaman Target selesai: Juni 2025

No.	Nama Ranperwako	Pemrakarsa	Latar Belakang Penyusunan dan Dasar Hukum	Materi Pokok, Ruang Lingkup, dan Objek Pengaturan	Sasaran dan Target Waktu Penyelesaian
			dan Perolehan Rumah		
38.	Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	BPKPD	Adanya perubahan ketentuan besaran penghasilan dan kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah Dasar Hukum: Permen PKP Nomor 5 Tahun 2025 tentang Besaran Penghasilan dan Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah serta Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah	Penentuan kriteria masyarakat berpenghasilan rendah dan pembebasan PBG bagi masyarakat berpenghasilan rendah	Masyarakat Kota Pariaman Target selesai: Juni 2025
39.	Klasifikasi Arsip	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah	Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Dasar Hukum : Permendagri No. 83 Tahun 2022	Penyusunan Kode Klasifikasi Arsip sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 83 Tahun 2022	Tersusunnya Peraturan Wali Kota Pariaman tentang Kode Klasifikasi Arsip sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri terbaru Target selesai: Juli 2025
40.	Jadwal Retensi Arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Dasar Hukum : Permendagri No. 83 Tahun 2022	Penyusunan Jadwal Arsip Arsip sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 83 Tahun 2022	Tersusunnya Peraturan Wali Kota Pariaman tentang Jadwal Retensi Arsip sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri terbaru Target selesai: Juli 2025
41.	Sistem Klasifikasi	Dinas Perpustakaan	Melaksanakan ketentuan	Penyusunan SKKAD sesuai	Tersusunnya Peraturan

No.	Nama Ranperwako	Pemrakarsa	Latar Belakang Penyusunan dan Dasar Hukum	Materi Pokok, Ruang Lingkup, dan Objek Pengaturan	Sasaran dan Target Waktu Penyelesaian
	Keamanan Arsip Dan Akses Arsip Dinamis	an dan Kearsipan Daerah	peraturan perundang-undangan Dasar Hukum: Permendagri No. 83 Tahun 2022	Permendagri No. 83 Tahun 2022	Walikota tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman Target selesai: Juli 2025
42.	Tata Cara Kerja Sama pada Badan Layanan Umum Daerah Kota Pariaman	Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kota Pariaman	Melaksanakan Ketentuan Pasal 91 Permendagri No.79 Tahun 2018 Dasar Hukum: Permendagri No.79 Tahun 2018	Pedoman dalam pelaksanaan kerjasama Badan Layanan Umum Daerah Kota Pariaman dengan pihak lain.	Pemerintah Kota Pariaman Target selesai: Juli 2025
43.	Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah	Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kota Pariaman	Melaksanakan Ketentuan Pasal 77 ayat (1) Permendagri No.79 Tahun 2018 Dasar Hukum: Permendagri No.79 Tahun 2018	Pedoman dalam pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa Badan Layanan Umum Daerah Kota Pariaman dengan pihak lain.	Pemerintah Kota Pariaman Target selesai: Juli 2025
44.	Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat	Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kota Pariaman	melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (3), Pasal 73, Pasal 85 ayat (2), Pasal 87 ayat (5), Pasal 94, Pasal 96, Pasal 99 ayat (5) Permendagri No.79 Tahun 2018 Dasar Hukum: Permendagri No.79 Tahun 2018	pedoman dalam Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat	Pemerintah Kota Pariaman Target selesai: Juli 2025
45.	Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Jati Hilir Kecamatan	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pariaman	Melaksanakan ketentuan Permendagri No. 45 Tahun 2016.	1. Penetapan, Tujuan, Kewenangan Wali Kota, Proses dan Mekanisme/pr osedur	Pemerintah Kota Pariaman Target selesai: Sept 2025

No.	Nama Ranperwako	Pemrakarsa	Latar Belakang Penyusunan dan Dasar Hukum	Materi Pokok, Ruang Lingkup, dan Objek Pengaturan	Sasaran dan Target Waktu Penyelesaian
	Pariaman Tengah		Dasar Hukum : Permendagri No. 45 Tahun 2016	Penetapan Batas Desa. 2. Dokumentasi dan Pengarsipan Batas Desa. 3. Garis Batas antar Desa, Titik koordinat batas, penanda batas fisik, dokumen hasil penetapan batas desa.	
46.	Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Jawi-Jawi I Kecamatan Pariaman Tengah	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pariaman	Melaksanakan ketentuan Permendagri No. 45 Tahun 2016. Dasar Hukum : Permendagri No. 45 Tahun 2016	1. Penetapan, Tujuan, Kewenangan Wali Kota, Proses dan Mekanisme/prosedur Penetapan Batas Desa. 2. Dokumentasi dan Pengarsipan Batas Desa. 3. Garis Batas antar Desa, Titik koordinat batas, penanda batas fisik, dokumen hasil penetapan batas desa.	Pemerintah Kota Pariaman Target selesai: Sept 2025
47.	Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Jawi-Jawi II Kecamatan Pariaman Tengah	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pariaman	Melaksanakan ketentuan Permendagri No. 45 Tahun 2016. Dasar Hukum : Permendagri No. 45 Tahun 2016	1. Penetapan, Tujuan, Kewenangan Wali Kota, Proses dan Mekanisme/prosedur Penetapan Batas Desa. 2. Dokumentasi dan Pengarsipan Batas Desa. 3. Garis Batas antar Desa, Titik koordinat batas, penanda batas	Pemerintah Kota Pariaman Target selesai: Sept 2025

No.	Nama Ranperwako	Pemrakarsa	Latar Belakang Penyusunan dan Dasar Hukum	Materi Pokok, Ruang Lingkup, dan Objek Pengaturan	Sasaran dan Target Waktu Penyelesaian
				fisik, dokumen hasil penetapan batas desa.	
48.	Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Kampung Jawa I Kecamatan Pariaman Tengah	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pariaman	Melaksanakan ketentuan Permendagri No. 45 Tahun 2016. Dasar Hukum : Permendagri No. 45 Tahun 2016	1. Penetapan, Tujuan, Kewenangan Wali Kota, Proses dan Mekanisme/prosedur Penetapan Batas Desa. 2. Dokumentasi dan Pengarsipan Batas Desa. 3. Garis Batas antar Desa, Titik koordinat batas, penanda batas fisik, dokumen hasil penetapan batas desa.	Pemerintah Kota Pariaman Target selesai: Sept 2025
49.	Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Kampung Jawa II Kecamatan Pariaman Tengah	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pariaman	Melaksanakan ketentuan Permendagri No. 45 Tahun 2016. Dasar Hukum : Permendagri No. 45 Tahun 2016	1. Penetapan, Tujuan, Kewenangan Wali Kota, Proses dan Mekanisme/prosedur Penetapan Batas Desa. 2. Dokumentasi dan Pengarsipan Batas Desa. 3. Garis Batas antar Desa, Titik koordinat batas, penanda batas fisik, dokumen hasil penetapan batas desa.	Pemerintah Kota Pariaman Target selesai: Sept 2025
50.	Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Alai Gelombang Kecamatan	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pariaman	Melaksanakan ketentuan Permendagri No. 45 Tahun 2016.	1. Penetapan, Tujuan, Kewenangan Wali Kota, Proses dan Mekanisme/prosedur	Pemerintah Kota Pariaman Target selesai: Sept 2025

No.	Nama Ranperwako	Pemrakarsa	Latar Belakang Penyusunan dan Dasar Hukum	Materi Pokok, Ruang Lingkup, dan Objek Pengaturan	Sasaran dan Target Waktu Penyelesaian
	Pariaman Tengah		Dasar Hukum : Permendagri No. 45 Tahun 2016	Penetapan Batas Desa. 2. Dokumentasi dan Pengarsipan Batas Desa. 3. Garis Batas antar Desa, Titik koordinat batas, penanda batas fisik, dokumen hasil penetapan batas desa.	
51.	Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Jalan Baru Kecamatan Pariaman Tengah	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pariaman	Melaksanakan ketentuan Permendagri No. 45 Tahun 2016. Dasar Hukum : Permendagri No. 45 Tahun 2016	1. Penetapan, Tujuan, Kewenangan Wali Kota, Proses dan Mekanisme/prosedur Penetapan Batas Desa. 2. Dokumentasi dan Pengarsipan Batas Desa. 3. Garis Batas antar Desa, Titik koordinat batas, penanda batas fisik, dokumen hasil penetapan batas desa.	Pemerintah Kota Pariaman Target selesai: Sept 2025
52.	Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Jalan Kereta Api Kecamatan Pariaman Tengah	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pariaman	Melaksanakan ketentuan Permendagri No. 45 Tahun 2016. Dasar Hukum : Permendagri No. 45 Tahun 2016	1. Penetapan, Tujuan, Kewenangan Wali Kota, Proses dan Mekanisme/prosedur Penetapan Batas Desa. 2. Dokumentasi dan Pengarsipan Batas Desa. 3. Garis Batas antar Desa, Titik koordinat batas, penanda batas	Pemerintah Kota Pariaman Target selesai: Sept 2025

No.	Nama Ranperwako	Pemrakarsa	Latar Belakang Penyusunan dan Dasar Hukum	Materi Pokok, Ruang Lingkup, dan Objek Pengaturan	Sasaran dan Target Waktu Penyelesaian
				fisik, dokumen hasil penetapan batas desa.	
53.	Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Kampung Perak Pariaman Tengah	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pariaman	Melaksanakan ketentuan Permendagri No. 45 Tahun 2016. Dasar Hukum : Permendagri No. 45 Tahun 2016	1. Penetapan, Tujuan, Kewenangan Wali Kota, Proses dan Mekanisme/prosedur Penetapan Batas Desa. 2. Dokumentasi dan Pengarsipan Batas Desa. 3. Garis Batas antar Desa, Titik koordinat batas, penanda batas fisik, dokumen hasil penetapan batas desa.	Pemerintah Kota Pariaman Target selesai: Sept 2025
54.	Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Kampung Pondok Kecamatan Pariaman Tengah	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pariaman	Melaksanakan ketentuan Permendagri No. 45 Tahun 2016. Dasar Hukum : Permendagri No. 45 Tahun 2016	1. Penetapan, Tujuan, Kewenangan Wali Kota, Proses dan Mekanisme/prosedur Penetapan Batas Desa. 2. Dokumentasi dan Pengarsipan Batas Desa. 3. Garis Batas antar Desa, Titik koordinat batas, penanda batas fisik, dokumen hasil penetapan batas desa.	Pemerintah Kota Pariaman Target selesai: Sept 2025
55.	Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Karan Aur Kecamatan	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pariaman	Melaksanakan ketentuan Permendagri No. 45 Tahun 2016.	1. Penetapan, Tujuan, Kewenangan Wali Kota, Proses dan Mekanisme/prosedur	Pemerintah Kota Pariaman Target selesai: Sept 2025

No.	Nama Ranperwako	Pemrakarsa	Latar Belakang Penyusunan dan Dasar Hukum	Materi Pokok, Ruang Lingkup, dan Objek Pengaturan	Sasaran dan Target Waktu Penyelesaian
	Pariaman Tengah		Dasar Hukum : Permendagri No. 45 Tahun 2016	Penetapan Batas Desa. 2. Dokumentasi dan Pengarsipan Batas Desa. 3. Garis Batas antar Desa, Titik koordinat batas, penanda batas fisik, dokumen hasil penetapan batas desa.	
56.	Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Lohong Kecamatan Pariaman Tengah	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pariaman	Melaksanakan ketentuan Permendagri No. 45 Tahun 2016. Dasar Hukum : Permendagri No. 45 Tahun 2016	1. Penetapan, Tujuan, Kewenangan Wali Kota, Proses dan Mekanisme/prosedur Penetapan Batas Desa. 2. Dokumentasi dan Pengarsipan Batas Desa. 3. Garis Batas antar Desa, Titik koordinat batas, penanda batas fisik, dokumen hasil penetapan batas desa.	Pemerintah Kota Pariaman Target selesai: Sept 2025
57.	Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Pasir Kecamatan Pariaman Tengah	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pariaman	Melaksanakan ketentuan Permendagri No. 45 Tahun 2016. Dasar Hukum : Permendagri No. 45 Tahun 2016	1. Penetapan, Tujuan, Kewenangan Wali Kota, Proses dan Mekanisme/prosedur Penetapan Batas Desa. 2. Dokumentasi dan Pengarsipan Batas Desa. 3. Garis Batas antar Desa, Titik koordinat batas, penanda batas	Pemerintah Kota Pariaman Target selesai: Sept 2025

No.	Nama Ranperwako	Pemrakarsa	Latar Belakang Penyusunan dan Dasar Hukum	Materi Pokok, Ruang Lingkup, dan Objek Pengaturan	Sasaran dan Target Waktu Penyelesaian
				fisik, dokumen hasil penetapan batas desa.	
58.	Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Pondok II Kecamatan Pariaman Tengah	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pariaman	Melaksanakan ketentuan Permendagri No. 45 Tahun 2016. Dasar Hukum : Permendagri No. 45 Tahun 2016	1. Penetapan, Tujuan, Kewenangan Wali Kota, Proses dan Mekanisme/prosedur Penetapan Batas Desa. 2. Dokumentasi dan Pengarsipan Batas Desa. 3. Garis Batas antar Desa, Titik koordinat batas, penanda batas fisik, dokumen hasil penetapan batas desa.	Pemerintah Kota Pariaman Target selesai: Sept 2025
59.	Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Taratak Kecamatan Pariaman Tengah	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pariaman	Melaksanakan ketentuan Permendagri No. 45 Tahun 2016. Dasar Hukum : Permendagri No. 45 Tahun 2016	1. Penetapan, Tujuan, Kewenangan Wali Kota, Proses dan Mekanisme/prosedur Penetapan Batas Desa. 2. Dokumentasi dan Pengarsipan Batas Desa. 3. Garis Batas antar Desa, Titik koordinat batas, penanda batas fisik, dokumen hasil penetapan batas desa.	Pemerintah Kota Pariaman Target selesai: Sept 2025
60.	Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Ujung Batung Kecamatan	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pariaman	Melaksanakan ketentuan Permendagri No. 45 Tahun 2016.	1. Penetapan, Tujuan, Kewenangan Wali Kota, Proses dan Mekanisme/prosedur	Pemerintah Kota Pariaman Target selesai: Sept 2025

No.	Nama Ranperwako	Pemrakarsa	Latar Belakang Penyusunan dan Dasar Hukum	Materi Pokok, Ruang Lingkup, dan Objek Pengaturan	Sasaran dan Target Waktu Penyelesaian
	Pariaman Tengah		Dasar Hukum : Permendagri No. 45 Tahun 2016	Penetapan Batas Desa. 2. Dokumentasi dan Pengarsipan Batas Desa. 3. Garis Batas antar Desa, Titik koordinat batas, penanda batas fisik, dokumen hasil penetapan batas desa.	
61.	Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kampung Baru Kecamatan Pariaman Tengah	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pariaman	Melaksanakan ketentuan Permendagri No. 45 Tahun 2016. Dasar Hukum : Permendagri No. 45 Tahun 2016	1. Penetapan, Tujuan, Kewenangan Wali Kota, Proses dan Mekanisme/ prosedur Penetapan Batas Desa. 2. Dokumentasi dan Pengarsipan Batas Desa. 3. Garis Batas antar Desa, Titik koordinat batas, penanda batas fisik, dokumen hasil penetapan batas desa.	Pemerintah Kota Pariaman Target selesai: Sept 2025
62.	Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2025 – 2029	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pariaman	1. Dalam rangka pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal. 2. Mengimplemen tasikan penerapan standar pelayanan minimal di	Dokumen rencana aksi daerah SPM terdiri dari: Pendahuluan, kondisi umum wilayah, kebijakan nasional dan tim penerapan SPM, memuat program prioritas pemenuhan SPM dan strategi dan kebijakan pencapaian SPM serta	Pemerintah Kota Pariaman Target selesai: Sept 2025

No.	Nama Ranperwako	Pemrakarsa	Latar Belakang Penyusunan dan Dasar Hukum	Materi Pokok, Ruang Lingkup, dan Objek Pengaturan	Sasaran dan Target Waktu Penyelesaian
			Kota Pariaman. Dasar Hukum : Peraturan Permendagri No. 59 Tahun 2021	mekanisme monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan SPM.	
63.	Pengelolaan Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman	Inspektorat Kota Pariaman	Melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan Dasar Hukum : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2023	Pengelolaan Pengaduan berdasarkan kategori tidak berkadar pengawasan dan berkadar pengawasan	Tersusunnya laporan atas tindak lanjut pengaduan yang berkadar pengawasan dalam MCP KPK 2025 Target selesai: Agustus 2025
64.	Pemeliharaan Eliminasi Malaria	Dinas Kesehatan	Melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan No.22 Tahun 2022 Dasar Hukum : Peraturan Menteri Kesehatan No.22 Tahun 2022.	Pemeliharaan eliminasi malaria bagi kota yang telah eliminasi	Pemerintah Kota Pariaman. Target selesai: Agustus 2025
65.	Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2025 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara	Bagian Organisasi	Adanya perubahan ketentuan tentang peningkatan disiplin dan produktifitas kerja ASN Dasar Hukum: PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Pengaturan Jam kerja, Absensi dan disiplin	Pemerintah Kota Pariaman. Target selesai: Juli 2025

WALI KOTA PARIAMAN, *h*

h YOTA BALAD *h*

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	<i>10/6 2025</i>
SEKIDANG PARIAMAN	<i>10/6 2025</i>
SISTEM PENGENDALIAN DAN KONTROL SAKSI	<i>10/6 25</i>
KABANG KUM	<i>10/6-25</i>
ILY	